

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu bencana yang paling umum terjadi di Indonesia adalah banjir. Bencana banjir dapat terjadi baik pada kota – kota yang terletak pada dataran rendah maupun pada dataran tinggi. Kota yang terletak pada wilayah pesisir memiliki potensi banjir yang lebih tinggi dibandingkan daerah perbukitan. Salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi banjir yang cukup tinggi adalah DKI Jakarta.

Kota Jakarta memiliki lokasi yang terletak pada pesisir pantai yang merupakan dataran rendah. Posisi Kota Jakarta juga dikelilingi oleh wilayah dataran tinggi seperti Bogor dan Bandung. Faktor utama menjadikan Kota Jakarta krisis banjir adalah jumlah kepadatan penduduknya sendiri.

Tercatat menurut data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), bencana banjir di Kota Jakarta masih banyak terjadi. Pada tahun 2012, puncak banjir Kota Jakarta terjadi pada 10 titik dan berlangsung selama 9 hari. Pada tahun 2013, puncak banjir Kota Jakarta terjadi pada 35 titik dan berlangsung selama 15 hari. Pada tahun 2014, puncak banjir Kota Jakarta terjadi pada 37 titik dan berlangsung selama 20 hari. Pada tahun 2015, puncak banjir Kota Jakarta terjadi pada 38 titik dan berlangsung selama 7 hari. Sedangkan pada tahun 2016, puncak banjir Kota Jakarta terjadi pada 15 titik dan berlangsung selama 5 hari.

Menurut data survey Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terdapat 41 kelurahan rawan tergenang banjir di Jakarta. Wilayah – wilayah tersebut rawan tergenang banjir karena berada dekat dengan sungai – sungai utama Kota Jakarta.

Wilayah – wilayah rawan genangan banjir tersebut diantaranya adalah; DAS Ciliwung meliputi kelurahan Pengadegan, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Manggarai, Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Cawang, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Bidara Cina, dan Kelurahan Kampung Melayu.

Daerah rawan genangan banjir pada DAS Pesanggrahan merupakan Kelurahan Ulujami, Kelurahan Pesanggrahan, Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Cipulir, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Kedoya Selatan, Kelurahan Kembangan

Selatan, dan Kelurahan Rawa Buaya. Pada DAS Cipinang, daerah rawan genangan banjir adalah Kelurahan Pekayon, Kelurahan Cibubur, Kelurahan Kampung Rambutan, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Makasar, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Dukuh, dan Kelurahan Kramat Jati. Pada DAS Krukut, wilayah rawan terdampak banjir adalah Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan podok Labu, Kelurahan Cipete Utara, Kelurahan Petogongan, dan Kelurahan Rawa Barat. Pada DAS Angke, daerah rawan genangan banjir terdapat pada Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kedaug Kali Angke, Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Kembangan Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan. Daerah rawan tergenang banjir pada DAS Sunter adalah Kelurahan Melayu, Kelurahan Cipinang, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Cipinang Muara.

Banjir di DKI Jakarta sudah menjadi hal yang umum bagi warga Indonesia maupun warga Jakarta sendiri. Kejadian banjir di permukiman cipinang muara hampir dipastikan terjadi setiap tahun. Luapan air tidak hanya pada area bibir Sungai Cipinang tetapi juga memasuki area permukiman. Bencana banjir dapat menyebabkan kerugian harta benda, kehilangan jiwa, sampai mengganggu sirkulasi kendaraan.

Tercatat pada tahun 2017, terdapat 13.857 Keluarga pada Kelurahan Cipinang Muara yang setiap tahunnya tergenang oleh banjir luapan dari sub DAS Cipinang. Banjir tersebut bukan hanya disebabkan oleh kondisi alam seperti curah hujan yang tinggi, tetapi juga disebabkan oleh buruknya infrastruktur kawasan, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga wilayahnya dari bencana banjir. Kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir berupa kerugian fisik dan juga non fisik seperti sekolah dan kantor diliburkan, kebutuhan pokok meningkat, dan juga terganggunya infrastruktur di sekitar kawasan.

Pada permukiman Cipinang Muara kecamatan Jatinegara, bencana banjir terjadi pada musim penghujan setiap tahunnya. Genangan banjir di kelurahan Cipinang Muara khususnya, berasal dari luapan air sungai dan juga drainase permukiman yang kurang baik. Genangan banjir tersebut juga meluap hingga jalan utama, sehingga dapat menghambat transportasi hingga kegiatan ekonomi di Jakarta Timur.

Menurut jurnal BNPB pada tahun 2016, terdapat setidaknya 10.347 keluarga yang mengalami bencana banjir. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 4.500 keluarga yang kehilangan huniannya karena hanyut terbawa oleh genangan banjir. Menurut tuturan BNPB Kota Jakarta, bencana banjir yang terjadi di kota – kota besar seperti

Jakarta, umumnya terjadi karena banyaknya titik – titik kumuh kota yang menjadi permukiman, sehingga terjadi penyumbatan air baik didalam tanah maupun diatas tanah. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa terdapat banyak lokasi kumuh sempadan sungai serupa Cipinang Muara yang menjadi langganan bencana banjir pada musim penghujan setiap tahunnya. Kelemahan infrastruktur terutama drainase kota menjadi hal penting yang menyebabkan tersumbatnya aliran air hujan. Banyaknya bangunan yang berdiri di sempadan sungai juga menjadi faktor utama tersumbatnya drainase tersebut.

Menurut Rosyidie (2013), Salah satu penyebab banjir di DKI Jakarta adalah lemahnya infrastruktur dan tata ruang. Terkait dengan hal tersebut adalah penurunan kapasitas sungai karena banyak pemanfaatan lahan sebagai permukiman warga di sempadan sungai. Hal tersebut terlihat dari kerusakan saluran penghubung dan fungsi drainase, sehingga tidak dapat menampung debit air terutama pada saat musim hujan. Penyebab lain terjadinya genangan banjir adalah lingkungan dan tata kota yang rusak akibat ketidak tepatan penggunaan lahan yang seharusnya tidak digunakan untuk lahan terbangun. Minimnya area Rung Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai area resapan dan juga sekaligus sebagai pengendali debit air menjadi penyebab utama yang sangat terlihat di Kota Jakarta. Penggunaan lahan dan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku salah satunya juga disebabkan oleh banyaknya warga pendatang yang pada akhirnya bermukim di lahan resapan.

1.2. Identifikasi Masalah

Bencana banjir di permukiman Kelurahan Cipinang Muara terjadi setiap tahun selama musim hujan. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya banjir pada permukiman Cipinang Muara, antara lain;

- a. Kondisi geologis kawasan yang berada di pinggiran sub DAS Cipinang serta curah hujan yang tinggi.
- b. Pengaruh ekonomi dan sosial budaya masyarakat terhadap budaya membangun yang menyebabkan kurangnya lahan untuk mengatur drainase air.
- c. Penggunaan lahan yang kurang tepat pada bibir sungai sehingga kondisi tanah tidak dapat menampung debit air pada saat musim hujan.
- d. Tingginya intensitas bangunan pada area bibir sungai sehingga tidak ada area resapan.

- e. Kepadatan bangunan pada permukiman tidak menyisakan area resapan dan aliran untuk drainase buangan air.
- f. Sistem drainase permukiman yang kurang tepat untuk mengatur aliran air buangan.
- g. Banyaknya masyarakat yang kurang paham dan/atau kurang peduli terhadap bahaya membangun di area bibir sungai dan terhadap kerentanan banjir pada permukiman.

Oleh karena permasalahan yang disebutkan diatas, maka diperlukan konsep permukiman tanggap bencana banjir di Kelurahan Cipinang Muara.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep permukiman tanggap bencana banjir pada permukiman Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur?

1.4. Batasan Masalah

Dari permasalahan tersebut, batasan pembahasan masalah adalah sebagai berikut:

- Konsep permukiman tanggap bencana dikhususkan pada ancaman genangan banjir.
- Lokasi studi dikhususkan pada permukiman rawan genangan banjir tepi sungai Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur.
- Rencana anggaran biaya tidak termasuk dalam pembahasan.

1.5. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan konsep tanggap bencana banjir pada permukiman sempadan sungai Kelurahan Cipinang Muara.

1.6. Kontribusi Penelitian

1.6.1 Secara Teoritik

Memberikan konsep tanggap bencana banjir pada permukiman sempadan sub DAS Sunter di Kelurahan Cipinang Muara. Dengan demikian kajian ini dapat dikembangkan lebih jauh untuk mencari alternatif pencegahan bencana melalui penataan permukiman.

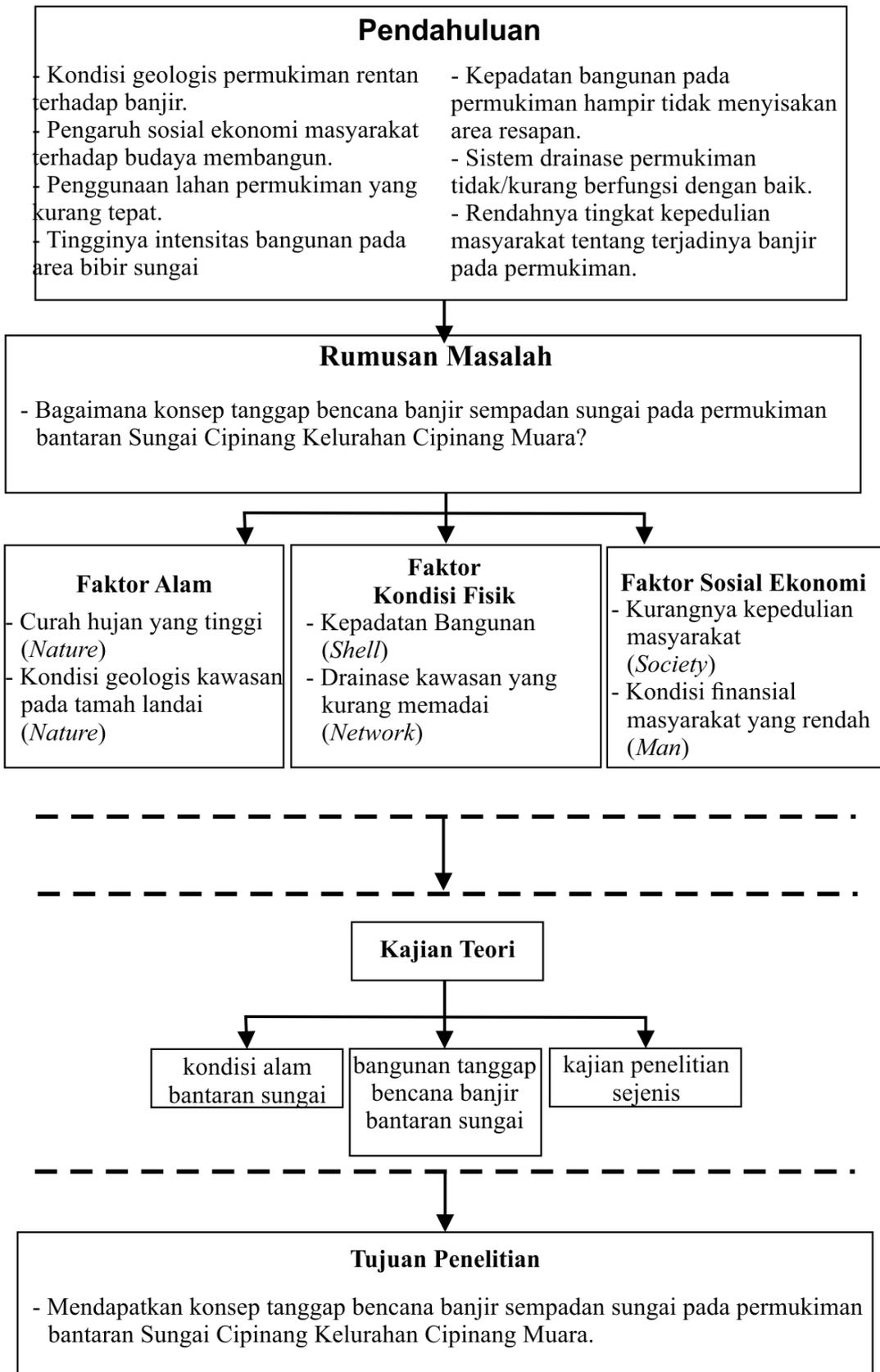
1.6.2 Secara Praktis

Memberikan konsep tindakan preventif dan mitigasi banjir pada permukiman bibir sungai. Dengan demikian kajian ini dapat dipertimbangkan oleh perencana kota maupun pihak pemerintah dalam merancang permukiman pada kawasan bibir sungai.

1.6.3 Bagi Pemerintah

Memberikan konsep tanggap bencana banjir dalam permasalahan permukiman sempadan sungai. Dengan demikian kajian ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam merancang peraturan maupun pola penataan ruang permukiman khususnya Kelurahan Cipinang Muara.

1.7. Kerangka Penelitian



Gambar 1.7.1 Kerangka Pemikiran

